

## DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, HL, 2017. *Values and Public Policy*. Washington DC: The Brooking Institution.
- Anwar, Shah. 2017. *Balance, Accountability and Responsiveness, Lesson about Decentralization*. Washington D.C., World Bank.
- Asante, Augustine D, Zwi, Anthony B, Ho, Maria T, 2016. *Getting by on Credit: How District Health Managers in Ghana Cope With The Untimely Release of Funds*, BMC Health Services Research.
- Atmadja, Abidin, 2017. *Kebijakan Publik*. Jakarta: Yayasan Pancur Siwah.
- Bahar, Ali, 2019. *Pelaksanaan dan Pengalokasian Dana Alokasi Khusus: Pendekatan Administrasi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Balgis, 2018. Analisis Proses Pelaksanaan Anggaran Dana BOK pada Dinas Kesehatan Kabupaten Buol. E-Jurnal Katalogis, Volume 6 Nomor 3 Maret 2018, ISSN: 2302-2019.
- Bastian, 2018. *Manajemen Anggaran Keuangan Daerah*. Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Bressman, House, and Wildansky, Katz, 2017. *Foundation of Behavioral Public Policy*. New York: Holt, Rinehart and Winston.
- Browne, Aeston, and Wildavsky, Bresnick, 2015. *Public Policy and Administration*. London: ELBS and MacDonald and Evans.
- Darise, Guene, 2018. *The Administration and Implementation of Regional Budget Allocation*. New York: Free Press.
- Djoyonegoro, 2017. *Pembangunan Ekonomi Nasional: Teori dan Aplikasi*. Penerbit Rajawali Press, Jakarta.
- Dunn, William N, 2014. *Public Policy Analysis: An Introduction*. Englewood, Cliffs, NJ: Prentice Hall Inc.
- , 1999. *Public Policy as Formulation, Implementation and Evaluation*. Englewood, Cliffs, NJ: Prentice Hall Inc.
- Dye, Thomas R, 2018. *Public Policy as Phenomenon*. New Jersey: Prentice Hall.

- , and James, G, 2018. *Understanding Public Policy*. New Jersey: Prentice Hall.
- Eyestone, Deirmand, 2017. *Public Policy – Making Reexamined*. San Francisco: Chandler Publishing Company.
- Frederickson, Morgan, and Hart, G, 2014. *Organization Theory, A Macro Perspective for management*, Prentice-Hall, New York.
- Friedrich, Bryson, and Agustino, Ackooff. 2017. *A Systems Approach of Public Policy*. Pittsburgh University Press.
- Ghea Harta Prayono, 2018. *Implementasi Kebijakan Pengelolaan DAK akibat Erupsi Gunung Agung di Kabupaten Karangasem*. Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik, 4 (2) (2019), 57-70. Jurnal Homepage: <https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/public-inspiration>.
- Goodrich, Davis, 2019. *Service Quality in Concept and Theory*. Published by American Press, New York.
- Grindle, Charles, 2018. *An Introduction to the Study of Public Policy*. 2<sup>nd</sup>, Ed. North Scituate, MA: Duxbury Press.
- Handry Mulyawan, 2012. Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan BOK di Dinas Kesehatan. Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia, Vol. 01 No. 03 September 20120.
- Islamy, Irfan, 2019. *Concept and Theory of Public Policy*. Published by American Press, New York.
- Karlina, 2017. Kontribusi DAK terhadap IPKM dalam Pelaksanaan Pembangunan Kesehatan di Kabupaten Tapin dan Banjar. Buletin Penelitian Sistem Kesehatan – Vol. 20 No. 2 April 2017.
- Kemenkes RI, 2016. *Petunjuk Teknis Penggunaan Dana DAK Bidang Kesehatan*, Kementerian Kesehatan, Jakarta.
- Kinman EL. 2019. *Evaluating health service equity at primary care klinik in Chilimarca, Bolivia*. Departement of Geography, University of Missouri, 15 Stewart Hall, Columbia, USA. Social Science and Medicine; 49:663-678.
- Lester, Steve and Steward, John, 2019. *Approaches in Public Policy*. London: George Allen & Unwin.

- Lipsky, Peter, 2014. *Reinventing Public Policy*. London: Butterworth & Heinemman.
- Lukman, P, 2015. *Pengantar Kebijakan Publik*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Mamik, K. 2017. *Monograf: Peningkatan Kepuasan Masyarakat Bidang Kesehatan*. Penerbit Pustaka Ilmu, Surabaya.
- Mazmanian, Daniel and Sabatier, Paul, 2015. *Development of Public Policy*. Revision Edition, New York: Marcel Dekker.
- Nugroho, Riant, 2016. *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Nuryatin Phaksy Sukowati, 2015. Implementasi Kebijakan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin Non Kuota. *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol .1, No. 6.
- Parasuraman, A. Valerie, 2014. *A Conceptual Model Of Service Quality And Implication For Future Research*. *Journal Of Marketing*, 49(fall): 41-50.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2019. *Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2020*. Menkes RI.
- Purwanto, M dan Sulistyastuti, 2014. *Perumusan Kebijakan Administrasi Publik*. Jakarta: Gunung Agung.
- Ripley, Boulding, and Franklin, Shafritz, 2016. *Classics of Public Policy*, New York: Harcourt Brace & Company.
- Rusdin, Nawi, 2012. *Analisis Implementasi Penguatan Kelembagaan*. Universitas Negeri Makassar.
- Subarsono, Mahmud, 2018. *Kebijakan Publik*. Jakarta: Yayasan Pancur Siwah.
- Surmayadi, 2015. *Perencanaan, Implementasi dan Kebijakan Publik*. Penerbit Pustaka Cakra, Surabaya.
- Syaukani, A, 2019. *Sistem Kebijakan Publik*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Jakarta.

Van Metter dan Van Horn, 2018. *Public Administration as Practice Policy*. Oxford: Capstone.

Wahyuningsih, 2018. Implementasi Program Bantuan Operasional Kesehatan di Puskesmas Tanete, Bulukumba. Departemen Administrasi Kesehatan, FKM, Universitas Hasanuddin, Makassar.

Winarno, 2018. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

-----, 2019. *Prinsip Perumusan Administrasi dalam Kebijakan Publik*. Jakarta: Sinar Grafika.

**Lampiran 1. Instrumen Penelitian**

## **PEDOMAN WAWANCARA**

### **ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) DI DINAS KESEHATAN KABUPATEN JAYAWIJAYA TAHUN 2020**

Peneliti

**ERNAWATI**  
**No. Pokok: K012191074**

#### **IDENTITAS INFORMAN**

Nama : .....

Umur : .....

Pendidikan : .....

Jabatan : .....

Tanggal Wawancara : .....

Waktu Wawancara : .....

#### **PERTANYAAN**

##### **A. Kebijakan Pemerintah**

1. Bagaimana kebijakan yang dibuat mengenai DAK untuk bidang kesehatan?

---

---

---

---

2. Apakah setiap kebijakan yang dibuat tersebut telah diimplementasikan? Bagaimana implementasinya di lapangan?

---

---

---

---

3. Apakah kebijakan yang dibuat tersebut sudah tepat dan menyangkut kepentingan umum?

---

---

---

---

4. Bisakah dijelaskan maksud dan tujuan dari implementasi kebijakan DAK untuk Dinas Kesehatan Kabupaten Jayawijaya!

---

---

---

---

#### **B. Implementasi Kebijakan DAK**

1. Bagaimana pelaksanaan DAK berupa biaya operasional di bidang kesehatan?

---

---

---

---

2. Berapa besar anggaran biaya operasional bidang kesehatan yang dialokasikan untuk daerah provinsi?

---

---

---

---

3. Berapa besar anggaran biaya operasional bidang kesehatan yang dialokasikan untuk daerah kabupaten/kota?

---

---

---

---

4. Berapa besar anggaran biaya operasional bidang kesehatan yang dialokasikan untuk Puskesmas?

---

---

---

---

5. Menurut anda, apakah DAK bidang kesehatan berupa biaya operasional mengalami peningkatan?

---

---

---

---

6. Menurut anda, DAK bidang kesehatan berupa biaya operasional sudah optimal dalam pengalokasiannya?

---

---

---

---

7. Bagaimana pelaksanaan DAK bidang kesehatan berupa jaminan persalinan?

---

---

---

---

8. Berapa besar anggaran jaminan persalinan yang dialokasikan untuk daerah provinsi?

---

---

---

---

9. Berapa besar anggaran jaminan persalinan yang dialokasikan untuk daerah kabupaten/kota?

---

---

---

---

10. Berapa besar anggaran jaminan persalinan yang dialokasikan untuk Puskesmas?

---

---

---

---

11. Menurut anda, apakah DAK bidang kesehatan berupa jaminan persalinan mengalami peningkatan?

---

---

---

---

12. Menurut anda, DAK bidang kesehatan berupa jaminan persalinan sudah optimal dalam pengalokasiannya?

---

---

---

---

13. Bagaimana pelaksanaan DAK bidang kesehatan berupa akreditasi Puskesmas?

---

---

---

---

14. Berapa besar anggaran akreditasi Puskesmas yang dialokasikan untuk daerah provinsi?

---

---

---

---

15. Berapa besar anggaran akreditasi Puskesmas yang dialokasikan untuk daerah kabupaten/kota?

---

---

---

---

16. Berapa besar anggaran akreditasi yang dialokasikan untuk Puskesmas?

---

---

---

---

17. Menurut anda, apakah DAK bidang kesehatan berupa akreditasi Puskesmas mengalami peningkatan?



---

---

---

---

18. Menurut anda, DAK bidang kesehatan berupa akreditasi Puskesmas sudah optimal dalam pengalokasiannya?

---

---

---

---

19. Bagaimana pelaksanaan DAK bidang kesehatan berupa pengawasan obat dan makanan?

---

---

---

---

20. Berapa besar anggaran pengawasan obat dan makanan yang dialokasikan untuk daerah provinsi?

---

---

---

---

21. Berapa besar anggaran pengawasan obat dan makanan yang dialokasikan untuk daerah kabupaten/kota?

---

---

---

---

22. Berapa besar anggaran pengawasan obat dan makanan yang dialokasikan untuk Puskesmas?

---

---

---

---

23. Menurut anda, apakah DAK bidang kesehatan berupa pengawasan obat dan makanan mengalami peningkatan?

---

---

---

---

24. Menurut anda, DAK bidang kesehatan berupa pengawasan obat dan makanan sudah optimal dalam pengalokasiannya?

---

---

---

---

25. Bagaimana pelaksanaan DAK bidang kesehatan berupa komunikasi kesehatan?

---

---

---

---

26. Berapa besar anggaran komunikasi kesehatan yang dialokasikan untuk daerah provinsi?

---

---

---

---

27. Berapa besar anggaran komunikasi kesehatan yang dialokasikan untuk daerah kabupaten/kota?

---

---

---

---

28. Berapa besar anggaran komunikasi kesehatan yang dialokasikan untuk Puskesmas?

---

---

---

---

29. Menurut anda, apakah DAK bidang kesehatan untuk komunikasi kesehatan mengalami peningkatan?

---

---

---

---

30. Menurut anda, DAK bidang kesehatan untuk komunikasi kesehatan sudah optimal dalam pengalokasiannya?

---

---

---

---

31. Bagaimana pelaksanaan DAK bidang kesehatan berupa penyediaan obat dan perbekalan kesehatan?

---

---

---

---

32. Berapa besar anggaran penyediaan obat dan perbekalan kesehatan yang dialokasikan untuk daerah provinsi?

---

---

---

---

33. Berapa besar anggaran penyediaan obat dan perbekalan kesehatan yang dialokasikan untuk daerah kabupaten/kota?

---

---

---

---

34. Berapa besar anggaran penyediaan obat dan perbekalan kesehatan yang dialokasikan untuk Puskesmas?

---

---

---

---

35. Menurut anda, apakah DAK bidang kesehatan untuk penyediaan obat dan perbekalan kesehatan mengalami peningkatan?

---

---

---

---

36. Menurut anda, DAK bidang kesehatan untuk penyediaan obat dan perbekalan kesehatan sudah optimal dalam pengalokasiannya?

---

---

---

---

**C. Akses dan Mutu Layanan Kesehatan**

1. Bagaimana pandangan anda mengenai implementasi kebijakan DAK di Dinas Kesehatan, apakah telah mampu mewujudkan akses layanan kesehatan yang maksimal? Jelaskan!

---

---

---

---

2. Apakah implementasi kebijakan DAK di Dinas Kesehatan telah memenuhi kebutuhan sarana dan prasana pelayanan kesehatan masyarakat? Jelaskan!

---

---

---

---

3. Apakah implementasi kebijakan DAK di Dinas Kesehatan telah mendorong percepatan pembangunan daerah? Jelaskan!

---

---

---

---

4. Apakah implementasi kebijakan DAK di Dinas Kesehatan telah mendorong pencapaian sasaran prioritas nasional di bidang pelayanan kesehatan? Jelaskan!

---

---

---

---

**D. Faktor Penentu (Pendukung/Penghambat)**

1. Bisakah anda jelaskan bagaimana komunikasi menjadi faktor penentu dalam implementasi kebijakan DAK di Dinas Kesehatan Kabupaten Jayawijaya? Apakah komunikasi menjadi faktor pendukung atau penghambat?

---

---

---

---

2. Jika sebagai faktor pendukung, bagaimana komunikasi mendukung implementasi kebijakan DAK bidang kesehatan?

---

---

---

---

3. Jika sebagai faktor penghambat, bagaimana komunikasi menghambat implementasi kebijakan DAK bidang kesehatan?

---

---

---

---

4. Bisakah anda jelaskan bagaimana sumberdaya menjadi faktor penentu dalam implementasi kebijakan DAK di Dinas Kesehatan Kabupaten Jayawijaya? Apakah sumberdaya menjadi faktor pendukung atau penghambat?

---

---

---

---

5. Jika sebagai faktor pendukung, bagaimana sumberdaya mendukung implementasi kebijakan DAK bidang kesehatan?

---

---

---

---

6. Jika sebagai faktor penghambat, bagaimana sumberdaya menghambat implementasi kebijakan DAK bidang kesehatan?

---

---

---

---

7. Bisakah anda jelaskan bagaimana disposisi menjadi faktor penentu dalam implementasi kebijakan DAK di Dinas Kesehatan Kabupaten Jayawijaya? Apakah disposisi menjadi faktor pendukung atau penghambat?

---

---

---

---

8. Jika sebagai faktor pendukung, bagaimana disposisi mendukung implementasi kebijakan DAK bidang kesehatan?

---

---

---

---

9. Jika sebagai faktor penghambat, bagaimana disposisi menghambat implementasi kebijakan DAK bidang kesehatan?

---

---

---

---

10. Bisakah anda jelaskan bagaimana struktur birokrasi menjadi faktor penentu dalam implementasi kebijakan DAK di Dinas Kesehatan Kabupaten Jayawijaya? Apakah struktur birokrasi menjadi faktor pendukung atau penghambat?

---

---

---

---

---

11. Jika sebagai faktor pendukung, bagaimana struktur birokrasi mendukung implementasi kebijakan DAK bidang kesehatan?

---

---

---

---

12. Jika sebagai faktor penghambat, bagaimana struktur birokrasi menghambat implementasi kebijakan DAK bidang kesehatan?

---

---

---

---



## DOKUMENTASI

### INFORMAN KUNCI

#### 1. KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN JAYAWIJAYA



#### 2. KEPALA SUB. BAGIAN PERENCANAAN DAN EVALUASI DINAS KESEHATAN KAB. JAYAWIJAYA



**3. KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN DINAS KESEHATAN KAB. JAYAWIJAYA**



**INFORMAN BIASA**

**1. KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) KAB. JAYAWIJAYA**





**2. KEPALA BIDANG PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT  
DINAS KESEHATAN KAB. JAYAWIJAYA**



**3. KEPALA BIDANG SUMBER DAYA KESEHATAN DINAS  
KESEHATAN KAB. JAYAWIJAYA**

